

PENGELOLAAN PENDIDIKAN YANG BERETIKA DAN BERMORAL MENJAMIN KUALITAS DAN PROFESIONALISME (Management and Moral Ensuring Quality and Professionalism)

H. Sulaeman. T

suleman@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: Judging from the condition of quantity and quality, it can be perceived that the quality of management education, especially in schools is still not as expected and that dibutuhkan. Pengelolaan education is not according to the standard of management education is probably due to the incompatibility of the results of the study were not fruitful and do not guarantee competence and the persistence of the ethical errors which only give knowledge only so many events that are not commendable ethically and normatif. Etika built is to make education can shape the characteristics to be a good human, noble character, high moral and can be life capital for people who uphold morality and ethics. There needs to be education reform is not only the education system but also about the philosophy and ethics of management education itself which will ensure the quality and professionalism.

Key Words: ethics, morality, quality, and education

Dilihat dari kondisi kuantitas maupun kualitas, dapat dirasakan bahwa kualitas manajemen pendidikan khususnya di sekolah masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan yang dibutuhkan. Pengelolaan pendidikan yang belum sesuai standar manajemen pendidikan ini mungkin akibat tidak sesuainya hasil dari pendidikan yang tidak berbuah dan tidak menjamin terpenuhinya kompetensi, dan masih adanya kekeliruan etika yang hanya memberikan pengetahuan saja sehingga masih banyak kejadian yang tidak terpuji secara etika dan normatif. Etika yang dibangun adalah menjadikan pendidikan dapat membentuk karakteristik untuk menjadi manusia yang baik, berbudi pekerti luhur, moral yang tinggi dan dapat menjadi modal hidup bagi manusia yang menjunjung tinggi moralitas dan beretika. Perlu ada reformasi pendidikan bukan hanya pada sistem pendidikan tetapi juga menyangkut filosofi dan etika pengelolaan pendidikan itu sendiri yang akan menjamin kualitas dan profesionalisme.

Kata kunci: etika, moralitas, kualitas, dan pendidikan

PENDAHULUAN

Interaksi berbagai macam proses pendidikan di masa lalu dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), karena hakikatnya menurut teori psikologi pada manusia adalah kemampuan berpikir verbal dan abstrak dapat berkomunikasi secara normatif melalui proses pembelajaran. Pembelajaran menurut Sagala ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid.¹

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan hal penting dilakukan mengingat peranan pendidikan adalah kunci utama membentuk sumber daya manusia berkualitas. Pendidikanlah membentuk perilaku manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional. Permasalahan penting yang perlu dibahas apakah Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen akan dapat mengakomodir dan menjamin etika dan moralitas pengelolaan pendidikan sehingga tercapainya kualitas pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, stabilitas ketertiban dan stabilitas ekonomi selama ini selalu menjadi perhatian utama. Alasannya stabilitas dapat menyelesaikan krisis bangsa, oleh karena itu cenderung mengabaikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) walaupun dapat ditegaskan

¹Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. (Bandung. Alfabeta). h. 61

asumsi bahwa pembangunan SDM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

Tetapi prioritas pemerintah masih pada stabilitas dan ketertiban, akibatnya manajemen pendidikan dengan etika dan moralitas yang tinggi belum menjadi prioritas. Akar dari krisis multidimensional yang berkepanjangan disebabkan oleh penyimpangan dan pelecehan terhadap hukum dan etika. Pemahaman serta kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai prinsip-prinsip etika, khususnya etika manajemen pendidikan amatlah rapuh. Karena itu, selain merenungkan tindakan yang telah dilakukan dan juga mencari alternatif pemecahan krisis juga perlu berupaya merevitalisasi nilai-nilai etis untuk melengkapi norma hukum yang mengatur berbagai aspek dalam manajemen pendidikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penyajian dalam tulisan ini membahas, etika pengelolaan pendidikan untuk menjamin kualitas dan profesionalisme merupakan bagian dari reformasi pendidikan.

PEMBAHASAN

Pendidikan yang memenuhi etika adalah pendidikan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam penyelenggaraannya. Dalam akuntabilitas terkandung rasa puas dari pihak lain, model kontrol, model dialog, dan kriteria ukuran. Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan, pengulangan dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol akuntabilitas memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan yaitu tujuan atau performa yang ingin dicapai, program atau tugas yang harus dikerjakan mencapai tujuan, cara atau performa pelaksanaan mengerjakan tugas, dana, alat dan metode yang dipakai jelas, lingkungan tempat program dilaksanakan, dan insentif pelaksana sudah ditentukan secara pasti. Sedangkan akuntabilitas pelayanan pendidikan di sekolah mempersoalkan etika dan moralitas penyelenggaraan yang dilakukan dengan berbagai upaya agar kelembagaan sekolah dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab kepada berbagai pihak berkepentingan (*stakeholders*) sehingga mereka memperoleh kepuasan atas kualitas kinerja sekolah. Bertolak dari pemikiran pentingnya mengkaji etika pendidikan dari berbagai sudut pandang, maka penulis

mempersembahkan tulisan ini kepada sidang pembaca dengan membahas etika pengelolaan pendidikan, etika pendidikan dapat meningkatkan kualitas, etika menjamin peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dan etika meningkatkan profesionalisme pendidikan.

Etika Pengelolaan Pendidikan

Meski banyak orang memandang bahwa etika pendidikan adalah suatu konsep yang membingungkan karena sulit untuk didefinisikan atau diukur, dan para ahli pun selalu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap etika. Namun dapat dirasakan bahwa etika bisa membedakan hal-hal yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya dalam pengelolaan pendidikan yang memenuhi etika, kualitaslah yang membedakan keberhasilan dan kegagalan. Karena itu mencari sumber kualitas dalam pengelolaan pendidikan adalah suatu pernyataan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi etika. Kualitas pengelolaan pendidikan menjadi pembahasan penting dalam mengkaji pengelolaan pendidikan khususnya pada tataran satuan pendidikan. Karena kualitas akan memberi indikasi apakah pengelolaan pendidikan dilakukan secara efektif, efisien dan dapat mencapai tujuan atau tidak, kemudian apakah *stakeholders* merasa puas atau tidak.

Untuk mengkaji lebih jauh mengenai kualitas yang diterapkan dalam manajemen pendidikan dapat disimak pandangan Unterbeger (1991), Trotman, Artzt (1992) dan perusahaan IBM mendefinisikan; bahwa kualitas sama dengan kepuasan pelanggan. Organisasi yang memperhatikan kualitas secara serius mengetahui bahwa rahasia kualitas kebanyakan terletak pada rasa simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai pemakai produk. Mengingat pentingnya kualitas oleh Salis telah dijelaskan seperti: *Citizen's Charter, the Parent's Charter, Investors in People, the European Quality award, British Standard BS5750, dan International Standard ISO 9000* yang menyediakan dan memberi penghargaan (*Award*) kepada perusahaan dan institusi yang dapat mempromosikan kualitasnya mencapai standar

yang ditetapkan oleh lembaga tersebut sebagai keunggulannya.²

Untuk memahami *total quality managemet* (TQM) diperlukan paradigma yang kuat sebagai pola pikir untuk menyaring informasi yang masuk ke dalam pikiran dan menerimanya apabila sesuai, dan menolaknya apabila tidak sesuai. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan pelanggan (*costumers*) oleh karena paradigma mengenai mutu dapat dinyatakan sebagai suatu karakteristik sesuatu yang harus dipelihara secara kontinu guna memenuhi kebutuhan dan kemauan pelanggan, sedangkan *paradigma produktivitas* adalah kunci keuntungan organisasi. Institusi award tersebut menunjukkan betapa penting dan perlunya kualitas sebuah institusi untuk diperhatikan dan dijaga, karena kualitas melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan secara baik dan benar.

Demikian pula terhadap pendidikan yang menghasilkan produk SDM yang harus berkualitas pula. Problematika yang dihadapi saat ini adalah apakah lembaga pendidikan telah memperhatikan, menerapkan, dan menjaga kualitasnya menghasilkan lulusan yang kompetitif baik tingkat regional maupun global. Problema ini tentu secara etika dijawab dengan pengelolaan pendidikan yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pengelolaan pendidikan yang tidak berkualitas berarti tidak memenuhi etika, jadi etika menjamin adanya kualitas pengelolaan pendidikan yang memberi kepuasan pada *stakeholders* karena mampu meningkatkan kualitas SDM.

Etika Pendidikan Mengoptimalkan Sumber Daya

Sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut UUSPN Nomor 20 tahun 2003, satuan pendidikan adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan

satuan pendidikan nonformal dan informal meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Untuk mengoptimalkan potensi perlu memahami jaminan kualitas secara esensial titik awalnya dimulai dari konsep kualitas menurut dunia usaha, karena dari dunia usahalah penelitian dan penerapan *total quality management* (TQM) dilakukan oleh para ahli, kemudian prinsip-prinsip TQM tersebut dapat disesuaikan penerapannya pada bidang usaha jasa dan pendidikan maupun pada bidang lainnya yang berkaitan pada pekerjaan manajerial baik yang bertumpu pada bidang lainnya yang berkaitan dengan pada pekerjaan manajerial baik yang bertumpu pada laba maupun nirlaba.

Potensi sumber daya pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan bagian dari etika pendidikan. Pendidikan sebagai suatu usaha mentransformasikan ilmu, pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik terstruktur formal, serta informal dan nonformal, dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan konsep pemberdayaan baik di rumah tangga, masyarakat atau sekolah sebagian satuan pendidikan. Jadi peranan etika menjadi semakin menonjol dan strategis dalam era perubahan sistem yang makin merebak dan merasuk ke seluruh lapisan masyarakat diseluruh penjuru dunia. Tampaklah bahwa etika mengoptimalkan potensi satuan pendidikan bukanlah berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi (*Complementer*) satu dengan lainnya.

Etika Menjamin Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidikan

Membicarakan masalah kualitas adalah pembicaraan yang hangat dan tiada henti terus menerus. Karena membicarakan kualitas berkaitan dengan performa lembaga apakah memberi manfaat atau tidak bagi para penggunanya. Oleh karena itu, menjamin kualitas manajemen pendidikan adalah bagian dari etika pendidikan. Kualitas pengelolaan akan mempengaruhi kualitas lulusan, jika kualitas layanan belajar memenuhi standar yang ditentukan, maka dimungkinkan kualitas lulusan akan kompetitif. Kualitas layanan itu dimulai dari layanan dinas pendidikan terhadap sekolah, layanan sekolah terhadap guru dan tenaga

²Sallis, E. *Total quality management in education*. (London: Kogan page lmt, 1993)

kependidikan, dan pada akhirnya layanan guru sebagai pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada semua institusi sekolah.

Produk pendidikan memiliki etika dan budaya yang didefinisikan sebagai masyarakat yang berperadaban, memiliki kebebasan merefleksikan kreativitas dalam dinamikanya secara komprehensif menuju kehidupan yang sejahtera diatur oleh norma hukum yang kuat, sebagaimana dicita-citakan seluruh masyarakat dan bangsa. Suatu hal penting akhir-akhir ini dalam lembaga pendidikan adalah bagaimana manajemennya dilaksanakan secara berkualitas. Berbicara mengenai kualitas (derajat) adalah umum, tetapi mengenai TQM pada manajemen pendidikan diperlukan perubahan budaya dari budaya bisnis semata-mata menjadi TQM pada manajemen sumber daya manusia.

Menurut Sallis TQM amat fleksibel dapat diadaptasi atau diterapkan pada berbagai institusi besar atau kecil termasuk dalam pendidikan. TQM pendidikan berarti menjamin standar kualitas manajemen pendidikan dengan pusat perhatian pada proses belajar akan menghasilkan inovasi, kreativitas. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa isu penting TQM dalam sektor pendidikan adalah jaminan kualitas pelayanan, berarti meningkatkan standar pelayanan institusi terhadap kebutuhan masyarakat (*costumers*), menekankan pada monitoring proses pendidikan mengacu pada efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan indikator performansi.³

Sallis menyatakan bahwa dasar konsep kualitas dalam pendidikan dipahami secara elitis, kualitas tinggi pada institusi pendidikan dipandang dari pengalaman belajar bukan pada aspirasi, bagaimanapun ide dasar kualitas tinggi adalah bagaimana institusi pendidikan mendemonstrasikan performasinya dengan standar dan etika yang tinggi. Kualitas juga merupakan konsep yang relatif, definisi kualitas tidak hanya dipandang dari sisi produk atau pelayanan tetapi sesuatu yang lebih dari itu, yaitu mendefinisikan kualitas produk dan pelayanan pada produser dan standar yang telah ditentukan

dan menjamin spesifikasi kualitas sistem secara konsisten serta memenuhi tuntutan *costumers*.⁴

Ide-ide penting yang perlu diperhatikan dan dipahami terhadap definisi kualitas di antaranya adalah kualitas kontrol, jaminan kualitas, dan kualitas total. Konsep kualitas kontrol adalah mendeteksi dan mengeliminasi apakah komponen-komponen produk sudah memenuhi standar atau belum, setiap peristiwa dalam proses dan setiap item-item dari produk dideteksi sedemikian rupa, dengan menggunakan metode yang dapat menjamin keutuhan kualitas proses maupun produk. Kualitas kontrol adalah pekerjaan inspeksi atau pengawasan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti secara profesional, standar kontrol juga dapat dipergunakan pada institusi pendidikan.

Jaminan kualitas berbeda dengan kualitas kontrol, karena jaminan kualitas dimulai dari sebelum proses, semua peristiwa yang terjadi, desain dan proses, jadi singkatnya jaminan kualitas berarti produk tanpa kerusakan dan kesalahan sepanjang masa dengan mempertahankan standar kualitas, prosedur dan standar pemeliharaan. Kualitas total adalah penyatuan dari jaminan kualitas, total adalah penyatuan dari jaminan kualitas. Total kualitas memperluas penyampaian, dan kualitas pengembangan dalam *Total Quality Management*. Kreativitas dan inovasi adalah sebuah budaya kualitas yang menjadi tujuan setiap anggota dan staf dalam struktur organisasi untuk memenuhi harapan *costumers*. Ada dua hal yang selalu menjadi pertanyaan mendasar memahami kualitas dalam setiap situasi yaitu apa produknya? dan siapa *costumers*-nya? Pertanyaan yang sama menjadi diskusi penting dalam pendidikan.

Pembicaraan tentang produk pendidikan selalu berkisar pada "hasil belajar" baik berupa perolehan nilai maupun keterampilan yang dimiliki. Dalam hal ini, secara khusus kualitas hasil belajar menjadi landasan performansi institusi adalah perilaku disiplin dalam proses pembelajaran. Permasalahannya adalah sulit menemukan definisi yang tepat pada pendidikan praktis, subjek jaminan kualitas adalah produk

³Sallis, E. *Total quality management in education*.

⁴Sallis, E. *Total quality management in education*.

yang memberi kepuasan pengguna jasa yaitu peserta didik dan orang tua peserta didik. Jaminan kualitas proses memerlukan prosedur, yang pertama spesifikasi kontrol suplai sumber daya, dan kedua spesifikasi standar material yang diperlukan dan proses penggunaannya. Karakteristik kualitas pelayanan pembelajaran sulit didefinisikan karena merupakan produk psikologi sangat dekat pada elemen subyektif.

Pelayanan di arahkan dari orang per orang yang memerlukan kualitas interaksi dengan memberikan peluang untuk melakukan evaluasi. Pelayanan dan produksi pendidikan berbeda dengan pelayanan pada perusahaan (*goods*) yaitu (1) setiap interaksi yang terjadi adalah berbeda, sehingga kualitas interaksi ditentukan oleh pelanggan. Sedangkan kualitas jasa ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu produsen pemberi jasa dan pelanggan yang menerima atau memakai jasa; (2) waktu merupakan elemen penting dari kualitas jasa; (3) jasa tidak dapat diperbaiki, karena itu penting standar jasa yang diberikan sejak awal penanganannya harus sudah benar. Kemungkinan tertinggi kesalahan pelayanan jasa adalah pada manusia; dan (4) jasa merupakan produk tidak berwujud (*intangibel*), dengan demikian sulit menjelaskan pelanggan potensial dan apa diinginkannya dari jasa yang diberikan secara tepat, maka jalan keluarnya jasa memfokuskan pada proses daripada produk, bukan apa produk itu tetapi bagaimana produk itu dapat diterima. Produk utama pendidikan adalah pelayanan (*service*). Oleh karena itu diperlukan jaminan kualitas pelayanan. Jika kualitas pendidikan akandiukur lebih dulu harus diidentifikasi kebutuhan apa yang harus dipenuhi sesuai yang diinginkan pelanggan. Maka penting memperjelas siapa sebenarnya yang membutuhkan, menginginkan, dan harus dipenuhi kepuasannya.

Beberapa ahli pendidikan lebih suka menggunakan istilah *klien* sebagai pengganti istilah pelanggan dalam pendidikan. Karena kata klien berkonotasi pelayanan profesional, bedanya klien adalah mereka yang memperoleh pelayanan pendidikan sedangkan pelanggan adalah mereka yang membayar pendidikan seperti orang tua, pemerintah, atau pihak-pihak lain yang memberi biaya bantuan pendidikan. membedakan pelanggan atas pelanggan *primer*,

pelanggan *sekunder*, dan *tersier*. Pelanggan primer adalah mereka yang langsung menerima jasa pendidikan, pelanggan sekunder adalah mereka yang mendukung pendidikan seperti orang tua (pelanggan utama). Pemerintah, sedangkan pelanggan tersier adalah mereka yang memiliki andil dalam kebijakan pendidikan seperti para pegawai negeri maupun swasta dan warga masyarakat lainnya.

Untuk mengembangkan mekanisme pelayanan institusi pendidikan perlu secara khusus memperhatikan keinginan masing-masing tipe pelanggan memahami batasan pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan eksternal dalam pendidikan) adalah peserta didik, orang tua, dan lainnya. Dalam konsep TQM guru, dosen, dan anggota staf lainnya merupakan pelanggan internal. Hubungan internal yang buruk mengakibatkan kerja lembaga menjadi tidak harmonis, konsep kualitas membangun hubungan internal menjadi lebih operasional terhindar dan konflik internal dan persaingan tidak sehat. Kebutuhan dan pandangan pelanggan internal dan eksternal memang berbeda, itulah sebabnya selalu muncul konflik yang aktual maupun potensial.

Masing-masing menjadi alasan eksistensi dan reputasi lembagapendidikan, dengan demikian jaminan kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan pelanggan (*costumer*) yaitu murid dan orang tua, kualitas dapat membedakan hal-hal yang ada baik proses maupun layanan, kualitas sama dengan kepuasan dengan kepuasan pelanggan akan hasil atau jasa yang diterimanya. Paradigma mengenai mutu pendidikan dapat dinyatakan sebagai karakteristik sesuatu yang harus dipelihara secara kontinu guna memenuhi kebutuhan dan kemajuan pengguna pendidikan. Pemahaman etika teoritis dalam pendidikan memang merupakan prasyarat untuk memahami etika terapan, terutama untuk menilai implementasinya dalam kehidupan dunia nyata. Dengan demikian tampak jelas bahwa etika dapat menjamin peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Etika Meningkatkan Profesionalisme Pendidikan

Profesionalisme para personel dalam suatu lembaga pendidikan menjadi jaminan apakah layanan pendidikan akan diterima oleh

pengguna jasa dengan memberi kepuasan atau tidak. Namun demikian belum ada persetujuan yang komplis seperti apasebenarnya substansi profesi yang harus disetujui, tetapi dapat ditemukan suatu rangkaian keterkaitan karakteristik di dalamnya bilamana seluruh komponen dan substansi profesi telah dikukuhkan secara penuh. Pada dasarnya dilihat dari sudut etika kelompok-kelompok pekerjaan dalam menerima satu jabatan selalu ada seperangkat karakteristik yang ideal, sekaligus tanggung jawab profesi. Kelompok pekerja tidak berpikiran tentang kebenaran suatu profesi, tetapi memiliki satu set karakteristik ketika mereka mencoba mengklaim bahwa dia adalah profesional untuk dirinya sendiri. Tanggapan terhadap pemahaman profesi yang ideal merupakan satu set ide tentang jenis pekerjaan yang dilakukan dengan profesi riil hubungannya dengan kelompok pada profesi lain.

Hubungan internalnya dengan kelompok sendiri, dengan klien dan masyarakat umum, karakter dari motivasi kelompok dan jenis dari *training* sesuai kebutuhan pelatihan yang diikuti guru. Jenis pekerjaan ditentukan dari hubungan kelompok profesi dengan orang dan grup lain yang mendukung penguatan profesi, dan membutuhkan jenis rekrutmen dan latihan. Maksudnya bukanlah mengatakan bahwa keterkaitan fakta ini adalah benar, tetapi lebih jauh bahwa kedua kelompok yaitu orang profesi dan awam (*layman*) percaya bahwa mereka harus membuat suatu pemahaman yang jelas jika pekerjaan itu profesi yang riil. Suatu profesi biasanya dipahami sebagai suatu pekerjaan milik seseorang dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri bahwa ia memiliki pengetahuan teoritik yang bagus secara esensial menyukkseskan penampilannya untuk tugas profesional yang tidak dapat diperoleh secara singkat.

Potret profesi yang ideal ditunjukkan pada suatu kelompok yang mementingkan kepentingan orang lain, dan profesi yang aktif dibentuk dengan suatu kode etik dengan penekanan pada pelayanan yang baik untuk klien sebagai tujuan profesional kelompoknya. Jangan diartikan kelompok profesi tidak akan *concern* dengan penghargaan berupa uang (*financial reward*), tetapi uang bukanlah tujuan utama. Definisi profesi secara eksplisit ada fungsi dan etika dalam arti bahwa kode etik sebagai mandat,

selanjutnya mendapat pengakuan sebagai anggota profesi, sementara klien (*pelanggan*) mendapat pelayanan yang tepat oleh profesional.

Para profesional sering mengklaim dan setuju bahwa mereka memiliki otonomi dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, memiliki pertimbangan dan menegakkan asumsi seberapa bagus pekerjaan mereka. Tetapi lain halnya dengan orang awam yang membuat pertimbangan tersendiri tentang apa yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan kualitas suatu pekerjaan. Tugas profesional selalu lebih dari suatu teknik aplikasi mekanikal, persoalannya bukan pada sebaik apa dia berpikir, tetapi sebaik apa dia dapat melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Sebagai guru yang profesional harus melakukan dua hal yaitu: (1) pertimbangan kebijakan yang luas dan penuh pertimbangan intelijen dalam menentukan apa yang harus dilakukan; dan (2) untuk menjustifikasi profesional sebagai harapan membuat profesi itu menjadi otonomi dan meningkatkan pertimbangan dan tanggung jawab di tangan orang profesional.

Artinya guru profesional bukan berada di bawah yang lain tetapi bekerja dengan orang lain sebagai anggota kelompok bekerja sama secara tim, dengan kata lain profesi adalah tergantung bagaimana fungsi profesi itu dilakukan dan dibentuk. Karakteristik profesi yang benar adalah munculnya "*organisasi profesi yang kuat*" yang memfasilitasi secara penuh apa yang menjadi karakteristiknya sendiri. Jabatan kependidikan dan profesi pendidikan akan membuat keseimbangan antara permintaan jabatan kependidikan secara umum, dengan spesialisasi profesional pendidikan secara khusus.

Nampaknya mudah mengatakan, tetapi dalam kenyataannya elemen jabatan pendidikan dan profesi pendidikan ini membuat suatu konflik situasi di dalam intern sendiri dengan adanya kesenjangan penekanan tujuan. Tekanan perbedaan ini terlihat pada penekanan servis profesional untuk pendidikan di satu sisi dan birokrasi pendidikan di sisi lain, dan ini meningkatkan konflik di dalam pendidikan yang memberi dampak terhadap profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Meski demikian, kuncinya adalah hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu dasar (*esoteric*)

yang mampu membedakan seorang profesi yang berpendidikan

Beberapa alasan untuk dipertimbangkan dalam politik pendidikan, yaitu (1) pimpinan asosiasi guru dan profesi pendidikan lainnya harus percaya bahwa lembaga itu ada secara spesifik dan harus dilakukan dengan baik membuat seseorang menjadi profesi yang baik; (2) membuat persyaratan khusus tipe latihan untuk seluruh guru maupun profesi pendidikan, dan ini akan menjadi kontrol terhadap profesi dan mengkreasikan suatu kondisi yang membuat orang berkemampuan tinggi; (3) *training* dalam profesi pendidikan merupakan lambang kesatuan untuk asosiasi kelompok profesional pendidikan; dan (4) jenis *training* yang khusus dapat menjadi perlindungan terhadap guru dan profesi pendidikan lainnya, artinya bahwa *training* merupakan hal penting di dalam lapangan pendidikan.

Para pakar mengemukakan bahwa sejarah evolusi profesi pendidikan dikembangkan secara luas untuk pendidikan guru dengan cara yang menyimpang, hanya profesi pengajaran yang telah dikembangkan dengan cara sedikit demi sedikit (*piecemeal*) sebagai perbaikan individu untuk pengembangan profesi. Sebenarnya ada beberapa *training* guru yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga dalam berbagai bentuk tanpa koordinasi yang jelas atau tanpa perencanaan menyeluruh bersifat lokal dan permintaan yang sesat. Kerusakan pada guru adalah akibat standar *training* yang tidak baik menimbulkan "*posisi guru berada pada taraf pinggiran*" sebab *training* yang dilakukan cenderung bersifat lokal dan temporer.⁵

Banyak persoalan profesi pengajaran yang kurang mendukung di lapangan. Keahlian dan mentalitas (*cara berpikir*) keguruan sebenarnya sama-sama dikuasai oleh Profesor pendidikan, administrator sekolah, guru dan mahasiswa/siswa pendidikan keguruan, tetapi anehnya mentalitas masyarakat termasuk guru mempercayai bahwa guru hanya sebagai "operator kelas" yang membutuhkan sedikit pengetahuan dan tanpa ilmu-ilmu teoritis. Mentalitas yang ditolak disini adalah bahwa

profesi pendidikan sebagai suatu profesi bukanlah hanya sebagai operator, tetapi profesi pendidikan adalah seorang pelaksana yang berpartisipasi untuk mengontrol seluruh kegiatan pendidikan yang standar. Dengan demikian tampak bahwa untuk memperoleh layanan pendidikan dengan proses yang benar tentu harus memenuhi etika, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pendidikan.

Etika pendidikan merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi pendidikan yang digunakan masyarakat modern untuk member, layanan pendidikan dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisis norma moral dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha pendidikan. Seperti telah ditunjukkan oleh deskripsi etika pendidikan masalah-masalah etika pendidikan mencakup beragam topik yang luas. Untuk memperkenalkan tingkatan keragaman tersebut, cukup membantu kita membedakan tiga jenis masalah yang dipelajari etika pendidikan, sistemik, lembaga pendidikan, dan individu. Masalah sistemik dalam etika pendidikan adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai ekonomi, politik sosial, budaya dan lainnya di mana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi etika pendidikan mempersiapkan peserta didik melalui proses pendidikan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik dilihat dan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

PENUTUP

Hakikat kehidupan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan norma dan tata-nilai kehidupan yang telah menjadi pola anutan masyarakatnya yaitu etika dan moralitas yang dapat dan harus dicapai oleh peserta didik, baik secara individual, kelompok, komunitas, atau bangsa melalui kegiatan pendidikan. Pada dasarnya hakikat masyarakat, memperoleh pendidikan yang dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

⁵Jarvis, Peter. *Professional Education*. (London: Croom Helm, 1983)

Penyelenggaraan pendidikan, sebagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dan akan memberi dampak pada perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih menjamin kesejahteraan yang lebih baik pula. Kenyataan yang berkaitan dengan tujuan dan kebijakan pendidikan ditetapkan setelah melalui kajian filsafat dengan mempertimbangkan kenyataan dan etika disepakati dan kenyataan yang sedang atau akan dialami. Proses penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan jika memenuhi etika pengelolaan pendidikan yang dapat menjamin kualitas dan profesionalisme dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Majid.Dkk,*Pendidikan Karakter prespektif Islam*, Remaja Rosda karya,Bandung. 2011
- Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.
- Depdikbud, *Program Akta Mengajar V-B Komponen Bidang Studi Teknologi Pengajaran Buku Modul II. Profesionalisasi Jabatan Guru* Depdikbud Jakarta. 1983.
- Jarvis, Peter. *Professional Education*. London: Croom Helm. 1983
- Langford, Glenn., *Teaching as a Profession An essay in philosophy of Education*. Oxford: Manchester University Press. 1978
- Fiske, Edward B. *Decentralization of Education Politics and Consensus*. Washington DC: The World Bank. 1996.
- Makmun, Abin Syamsudin. *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan (ADM 728) Pedoman dan intisari perkuliahan pada program Doktor Administrasi Pendidikan*. Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk kalangan Sendiri tidak diterbitkan. 1996.
- Sagala, S..*Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung. Alfabeta. 2007.
- Sallis, E..*Total quality management in education*. London: Kogan page Imt. 1993.
- Sutisna, Oteng. *Teacher Organization and Professionalization of Public School Teacher*. Makalah dipresentasikan pada Dr.H.M. Vollmer di Stanford University.Tidak diterbitkan. 1996.
- Presiden RI.. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Armas duta jaya. 2003

Tenner, A.R, dan DEtoro, I. J.. *Total quality management. Three steps to continuous Improvement*. Massachusetts: 1992